



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Achmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK - 78124



RANCANGAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023

BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI-----	i
DAFTAR TABEL-----	ii
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019-----	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Biro Perekonomian	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD -----	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian.....	46
3.3 Program dan Kegiatan	48
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----	56
BAB V. PENUTUP -----	65



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Pencapaian Renstra Biro Perekonomian Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat.....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	26
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	34
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat	43
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat	51
Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ketiga Rencana Strategis Biro Perekonomian Tahun 2018-2023. Sistem perencanaan pembangunan Biro Perekonomian merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5), yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Ketiga peraturan



perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 18) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023;
- 19) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 20) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 21) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Biro Perekonomian ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.



Adapun tujuan penyusunan Renja Biro Perekonomian Tahun 2023 yaitu;

- a. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta energi dan sumberdaya mineral;
- b. Meningkatkan Pengembangan Kebijakan di bidang sarana perekonomian daerah termasuk ekonomi kreatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan administrasi perkantoran;
- d. Meningkatkan Penilaian Kinerja Instansi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perekonomian Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Tahun 2023 mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Biro Perekonomian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Biro Perekonomian
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian
- 3.3. Program dan Kegiatan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BIRO PEREKONOMIAN

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Biro Perekonomian pada tahun 2021 terdapat Program dan Kegiatan pada tahun 2021 yang capaian kinerjanya dibawah target kinerja yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Untuk realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2021 secara keseluruhan Program/Kegiatan telah memenuhi target realisasi keluaran (output) yang telah direncanakan dan diuraikan sebagai berikut :



1. Program Perekonomian dan Pembangunan.

1.1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.

Program pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Perekonomian Kalimantan Barat. Output kegiatan telah memenuhi target kinerja dan output kegiatan adalah Jumlah Dokumen. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Perekonomian Makro Prov. Kalimantan Barat.

2.1.2. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Perekonomian Kalimantan Barat. Output kegiatan telah memenuhi target kinerja dan output kegiatan adalah Jumlah Dokumen. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Perekonomian Mikro Prov. Kalimantan Barat

1.2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

Program pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam di Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

2.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Keluatan dan Perikanan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Keluatan dan Perikanan di Kalimantan Barat. Output kegiatan telah memenuhi target kinerja dan output kegiatan adalah Jumlah Dokumen. Selanjutnya



outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Keluatan di Prov. Kalimantan Barat.

2.2.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Energi dan Air di Kalimantan Barat. Output kegiatan telah memenuhi target kinerja dan output kegiatan adalah Jumlah Dokumen. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Energi dan Air di Prov. Kalimantan Barat.

1.3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Program pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD pada Biro Perekonomian Setda Prov.Kalbar terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

2.3.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi di Kalimantan Barat. Output kegiatan telah memenuhi target kinerja dan output kegiatan adalah Jumlah Dokumen. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbdag dan Sanitasi di Prov. Kalimantan Barat.

2.3.2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Kalimantan Barat. Output kegiatan telah memenuhi target kinerja dan



output kegiatan adalah Jumlah Dokumen. Selanjutnya outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Prov. Kalimantan Barat.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian pada tahun 2021 dapat disampaikan bahwa keseluruhan program/kegiatan Biro Perekonomian telah memenuhi target realisasi keluaran (output) sebesar 100% dan tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa didalam pelaksanaan rencana kerja di Biro Perekonomian terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan faktor-faktor penyebabnya sebagai berikut :

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dimana di dalam kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Pemerintah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara serta kewenangan dalam penetapan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif dan batu bara.

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan



Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dimana di dalam kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan belum selesainya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tambahan setoran modal pada Perusda Aneka Usaha di DPRD Prov. Kalbar, dan Bahwa bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menegaskan bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

2.1.5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2021 tentunya berdampak terhadap target capaian program yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak terlaksana dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan. Akan tetapi secara keseluruhan output program dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa didalam pelaksanaan rencana kerja pada Biro Perekonomian terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, untuk itu perlu adanya kegiatan/tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut seperti :

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Pemerintah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara serta kewenangan dalam penetapan harga patokan



mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif dan batu bara. Untuk itu perlu kebijakan/tindakan lebih mengintensifkan koordinasi ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah kabupaten, kota dan Keterlibatan pemda provinsi kalbar lebih kepada klarifikasi.

- b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. Pada kegiatan ini dalam realisasi anggaran sudah tercapai tetapi dalam capaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum selesainya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tambahan setoran modal pada Perusahaan Aneka Usaha di DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan bahwa bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menegaskan bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini Raperda Perumda Aneka Usaha sebagai Raperda perubahan bentuk hukum Perusda Aneka Usaha sudah dilakukan finalisasi bersama dengan DPRD Prov. Kalimantan Barat dan telah masuk dalam sistem e-Perda Online Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 19 November 2021.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian
Pencapaian Renstra Biro Perekonomian s/d Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.15	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD			136.583.400						
5.01.5.01.01.08.16.01	Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dok	0						
5.01.5.01.01.08.16.02	Monitoring dan Evaluasi BUMD di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 Dok	44.162.800						
5.01.5.01.01.08.16.03	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Jumlah SDM BUMD	1 Dok	24.577.600						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.04	Penyusunan PERDA Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perda	1 Dok	19.910.000						
5.01.5.01.01.08.16.05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi Kalimantan Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dok	21.876.500						
5.01.5.01.01.08.16.06	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Badan Layanan Umum Daerah	1 Dok	26.056.500						
5.01.5.01.01.08.16	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Pangan			270.997.400						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	1 Dok	4.849.800						
5.01.5.01.01.08.16.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	1 Dok	63.628.900						
5.01.5.01.01.08.16.03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	4.094.000						
5.01.5.01.01.08.16.04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	5.204.700						
5.01.5.01.01.08.16.05	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dok	11.148.600						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	4.417.600						
5.01.5.01.01.08.16.07	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan	1 Dok	5.215.900						
5.01.5.01.01.08.16.08	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	5.822.300						
5.01.5.01.01.08.16.09	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan	1 Dok	18.165.900						
5.01.5.01.01.08.16.10	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dok	12.239.200						
5.01.5.01.01.08.16.11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	18.515.400						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.12	Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Bahan Sinkronisasi	-	0						
5.01.5.01.01.08.16.13	Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	1 Dok	20.319.800						
5.01.5.01.01.08.16.14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	9.277.000						
5.01.5.01.01.08.16.15	Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dok	11.928.900						
5.01.5.01.01.08.16.16	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	13.184.500						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.16.17	Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dok	22.513.900						
5.01.5.01.01.08.16.18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	9.094.000						
5.01.5.01.01.08.16.19	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen hasil Sinkronisasi	1 Dok	21.333.600						
5.01.5.01.01.08.16.20	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan	1 Dok	10.043.400						
5.01.5.01.01.08.16.21	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	-	0						
5.01.5.01.01.08.17	Program Bina Sarana Perekonomian		-	164.541.500						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.01	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum)	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dok	3.027.200						
5.01.5.01.01.08.02	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	26.689.600						
5.01.5.01.01.08.03	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	1 Dok	25.982.000						
5.01.5.01.01.08.04	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dok	10.704.700						
5.01.5.01.01.08.05	Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Upaya Percepatan Pembangunan	1 Dok	32.156.100						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	10.824.300						
5.01.5.01.01.08.07	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Analisa Makro	1 Dok	55.157.600						
5.01.5.01.01.08.18	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha			182.510.600						
5.01.5.01.01.08.18.01	Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dok	38.671.400						
5.01.5.01.01.08.18.02	Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Upaya Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat	1 Dok	6.604.300						
5.01.5.01.01.08.18.03	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	32.391.400						



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.5.01.01.08.18.04	Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dok	63.569.500						
5.01.5.01.01.08.18.05	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Percepatan Berusaha	1 Dok	41.274.000						
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan				888.729.800	888.729.800	100%			
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		-	348.495.712	348.495.712	100%			
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		-	233.385.766	233.385.766	100%			
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		-	142.922.257	142.922.257	100%			



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		-	20.591.860	20.591.860	100%			
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		-	20.950.248	20.950.248	100%			
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		-	46.329.305	46.329.305	100%			
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi		-	38.725.618	38.725.618	100%			



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD		-	37.329.034	37.329.034	100%			
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan							1.523.232.407		
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		-	-	-	-	395.475.600		
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		-	-	-	-	320.876.900		
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		-	-	-	-	212.635.000		
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		-	-	-	-	99.527.500		



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		-	-	-	-	98.693.600		
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		-	-	-	-	236.733.507		
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi		-	-	-	-	62.229.700		
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		-	-	-	-	0		



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan program / Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Biro Perekonomian Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD		-	-	-	-	98.678.000		
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		-	-	-	-	0		



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN

Analisis kinerja pelayanan Biro Perekonomian berdasarkan hasil kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian
Setda Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat			5,39%				5,39%				
2	Terkendalinya Inflasi Daerah			3,52%				3,52%				
3	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal			79%				80%				
4	Persentase Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD			79%				80%				
5	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD			83%				85%				
6	Persentase terlaksananya kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam dan Kehutanan yang Ditindaklanjuti			75%				85%				
7	Persentase Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan energi yang Ditindaklanjuti			75%				80%				
8	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti			75%				80%				



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti			75%				80%				
10	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti			77%				70%				
11	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti			77%				85%				
12	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah			83%				100%				
13	Persentase Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah			45%				70%				
14	Persentase Dokumen Pertimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha			53%				50%				
15	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti			66%				100%				
16	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti			50%				100%				



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti			66%				100%				
18	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti			83%				100%				
19	Persentase Terlaksananya di Sektor Pariwisata yang Ditindaklanjuti			33%				80%				
20	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti			45%				80%				
21	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti			33%				30%				
22	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti			33%				30%				
23	Indeks Efektifitas Kebijakan Perekonomian				80%	85%	90%		80%	85%	90%	
	Nilai SAKIP PD											
	Nilai Reformasi Birokrasi PD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	



Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Perekonomian dan Pembangunan, antara lain :

A. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro;

B. Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;

C. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.

2.3. ISU-ISU PENTING PEYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEREKONOMIAN.

Dalam kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dengan fungsinya



penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan Perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian maka Biro Perekonomian memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah.

Dalam pembangunan daerah, sumber daya alam berperan penting sebagai penyedia bahan baku bagi sektor produksi untuk pembangunan ekonomi dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana dan berkelanjutan agar pembangunan dan kehidupan masyarakat dapat hidup berlanjut.

Ada beberapa hal terkait masalah/kendala pada pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Perekonomian, antara lain sebagai berikut :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian

- Reschedule kegiatan setelah pemberlakuan PPKM selama Pandemi Covid-19 cukup menghambat program kinerja Bagian Kebijakan Perekonomian.
- Pada prinsipnya tidak ada kendala dalam realisasi belanja anggaran. Untuk Refocusing anggaran (misalnya jika tidak memungkinkan rapat tatap muka (diganti zoom) maka anggaran rapat dipindahkan ke atk dan alat-alat komputer) dan diharapkan dari kegiatan Refocusing dan Realokasi Anggaran adalah dapat tersedia anggaran yang memadai guna penanganan penyebaran Covid-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya.
- Untuk beberapa kegiatan rapat tetap dilaksanakan tanpa anggaran.
- Untuk kegiatan perjalanan dinas (monev/ koordinasi) ke kabupaten yang tidak terlaksana karena pemotongan anggaran, maka monev dan koordinasi dilakukan melalui komunikasi (telpon dan whatshaap).



2. Bagian Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

- Penerapan PPKM dan kebijakan WFH serta pemotongan anggaran menjadikan pelaksanaan program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan tidak dapat berjalan secara optimal, walaupun beberapa kegiatan rapat dapat dilakukan tanpa anggaran ataupun dengan zoom meeting;
- Mewabahnya covid-19 membuat koordinasi hanya dapat dijalankan dengan aplikasi media sosial seperti whatsapp, email maupun via telfon sehingga koordinasi menjadi kurang maksimal;
- Beberapa kegiatan rapat dilaksanakan tanpa anggaran;
- Dalam hal kebijakan pertambangan, kewenangan pemerintah pusat dinilai lebih dominan daripada kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah cukup sulit dan tidak dapat menyentuh kebijakan hulu maupun hilir di bidang pertambangan;
- Keterlibatan pemerintah daerah di bidang pertambangan lebih sebatas klarifikasi;
- Terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan lagi dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara serta kewenangan dalam penetaan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif dan batu bara;

3. Bagian Pengelolaan, Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

- Bahwa bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menegaskan bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
- Bahwa saat ini terjadi kekosongan pada jabatan Direktur PT. Jamkrida Kalimantan Barat atas nama Gusti Nuzulhan, SP yang diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Saham Luar Biasa PT. Jamkrida



Kalbar No. 03 Tanggal 10 Maret 2021. Kekosongan tersebut disebabkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021.

- Adanya pelarangan berpergian dinas keluar daerah karena kondisi Covid-19.
- Pemotongan Anggaran yang membuat tidak bisa melaksanakan kegiatan.
- Belum selesainya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tambahan setoran modal pada Perusda Aneka Usaha di DPRD Prov. Kalbar sehingga kegiatan penyerapan anggaran berkurang.
- Pemotongan Anggaran yang membuat tidak bisa melaksanakan kegiatan.
- Lambatnya penyampaian Tarif Air Minum oleh Kabupaten/Kota.
- Terhambatnya Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada BUMD Air Minum Kabupaten/Kota
- Dengan adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada Sub Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif.
- Lambatnya Koordinasi balik ataupun penyampaian data dari BLUD Provinsi maupun BLUD Kabupaten.
- Keterbatasan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah serta terhadap capaian Program Nasional. Masih adanya Program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat target indikator berdampak pada kurang optimalnya sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tantangan (*Threats*) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengembangan pelayanan , yaitu :

1. Meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan pelayanan birokrasi yang didukung dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur di bidang perekonomian;



2. Meningkatnya tuntutan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatnya tuntutan pelayanan melalui pemanfaatan berbasis teknologi informasi dalam rangka *E-Government* Bidang Perekonomian;
4. Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi, yaitu :

1. Tersedianya strategi *learning organization* dan pemanfaatan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
2. Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka reformasi birokrasi;
3. Era pemanfaatan teknologi digital dan penerapan aplikasi satu data;
4. Adanya dukungan kebijakan dan program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi.

Terdapat beberapa kebijakan atas isu-isu strategis yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian, yaitu :

- a. Kebijakan pengendalian inflasi;
- b. Kebijakan Analisa Makro Perekonomian;
- c. Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- d. Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum yang dimiliki oleh BUMD Air Minum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
- e. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- f. Menorong Penyelenggaraan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan kebijakan atas isu-isu strategis diatas dapat dirumuskan 1 (satu) sasaran isu strategis Biro Perekonomian, yaitu **“Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian”**.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan program dan kegiatan didalam Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2023, yaitu :



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22.665.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	24.931.940	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.274.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.901.840	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	16.274.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17.901.840	



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17.139.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	18.853.780	
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	24.456.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	26.902.590	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	38.148.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	41.963.680	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	15.160.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	16.676.880	
4 01 01 1.06	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah					Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah					
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.375.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.312.500	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Perekonomian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.199.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Perekonomian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.519.340	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Lapoan	61.004.372	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Lapoan	67.104.809	
4 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	33.426.100	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	36.768.710	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.232.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71.756.256	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Perekonomian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	61.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Perekonomian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	68.024.000	
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Biro Perekonomian	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Biro Perekonomian	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	16.500.000	
4 01 01 1.09.06	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Perekonomian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	38.880.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Perekonomian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	42.768.000	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 Dokumen	391.984.600	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 Dokumen	431.183.060	



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	314.284.900	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	345.713.390	
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	201.725.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	221.897.830	
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	87.400.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	96.140.220	
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	83.721.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	92.093.760	
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan					Pengelolaan Kebijakan dan					



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi BUMD dan BLUD					Koordinasi BUMD dan BLUD					
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	161.309.890	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	177.440.879	
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	74.924.400	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	82.416.840	
4 01 06 1.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	- Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	100.000.000	
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	1 Dokumen	93.871.700	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	1 Dokumen	103.258.870	



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

No. Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 06 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	- Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	100.000.000	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada forum OPD tidak ada Program/kegiatan yang ditujukan kepada Biro Perekonomian selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 merupakan tahapan transisi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Ada 10 (sepuluh) fokus yang menjadi program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, yaitu :

1. Pengembangan sistem perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal;
2. Meningkatkan efisiensi proses produksi industri (meningkatkan nilai tambah) dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri;
3. Memfasilitasi & membangun networking peningkatan inovasi, teknologi & kapasitas industri;
4. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan mendorong ketersediaan infrastruktur dasar untuk peningkatan penanaman modal, pengembangan industri, dan pengembangan dunia usaha;
5. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah;
6. Meningkatkan upaya intensifikasi pertanian;
7. Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan rakyat melalui intensifikasi, peremajaan, dan rehabilitasi serta peningkatan penggunaan benih bermutu;



8. Mendorong realisasi tanam dan pembangunan unit pengolahan pada perkebunan besar;
9. Pemantapan kawasan hutan dan peningkatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
10. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
11. Meningkatkan pelayanan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (Melampaui (>))	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Indeks Efektifitas Kebijakan Perekonomian	>	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan perekonomian.<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan perekonomian di bidang Kebijakan Perekonomian (Pengendalian Inflasi, Percepatan Berusaha, PDRB, Infrastruktur, Pariwisata Ekonomi Kreatif, Akses Keuangan).	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan dan komitmen penganggaran.2. Peraturan pemerintah pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan.3. Dukungan dan komitmen Gubernur dan Sekretaris Daerah.4. Hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan oleh PD teknis.5. Keberhasilan kolaborasi



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				perangkat daerah anggota tim lintas sektor.
			<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan perekonomian di bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta Ketahanan Pangan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air).	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi, sinkronisasi, transparansi data dan informasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan.2. Sumber Daya Manusia yang memiliki daya tanggap yang memadai dan mampu merespon dinamika yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan.
			<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan di bidang BUMD dan BLUD (BUMD Keuangan dan Aneka Usaha, Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan BLUD).	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan dan komitmen penganggaran.2. Peraturan pemerintah pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan.3. Sumber Daya Manusia.



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				<p>4. Koordinasi dan sinkronisasi peraturan terkait Bentuk Hukum BUMD antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah - Kementerian dalam Negeri.</p> <p>5. Sinkronisasi dan transparansi data BUMD dan BLUD.</p>
			<p>2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, BUMD dan BLUD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya (manusia, sarana/prasarana dan pembiayaan) yang memadai untuk melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh purnagkat daerah terkait di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan konsultasi, sinkronisasi untuk



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (Melampaui (>))	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian

Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis tersebut mengandung pernyataan visi, misi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta target yang diharapkan dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan.



A. Visi

Visi merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata kelola Pemerintahan”.

B. Misi

Visi tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance*;
- c. Mewujudkan Kualitas Hidup masyarakat;
- d. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera;
- e. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib;
- f. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka tujuan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat”.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah:



- 1) Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian;
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Strategi Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro;
- 2) Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pendorong Perekonomian Kalimantan Barat (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Energi dan Air);
- 3) Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pendirian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BLUD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Menetapkan Visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah” yang memuat 6 misi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Maka yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah poin ke- 4(empat) “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan barat, pada tahun 2023 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat merumuskan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mengsinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023, maka Biro Perekonomian melaksanakan misi ke- 5.

Dengan memperhatikan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023, maka Biro Perekonomian merumuskan rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari 2 Program 9



Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

I. Program Administrasi Umum

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan Mebel.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



II. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro;
2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;
3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD;
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Barat
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				1.867.300.922	PAD			2.306.402.564
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				458.078.332	PAD			503.886.165
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.810.900				106.491.990
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	1 Dokumen	22.665.400	PAD		1 Dokumen	24.931.940
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Perekonomian	1 Dokumen	16.274.400	PAD		1 Dokumen	17.901.840
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Biro Perekonomian	1 Dokumen	16.274.400	PAD		1 Dokumen	17.901.840



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Perekonomian	1 Laporan	17.139.800	PAD		1 Laporan	18.853.780
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	2 Laporan	24.456.900	PAD		2 Laporan	26.902.590
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				38.148.800				41.963.680
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Perekonomian	1 Laporan	38.148.800	PAD		1 Laporan	41.963.680
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.160.800				16.676.880
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Perekonomian	1 Laporan	15.160.800	PAD		1 Laporan	16.676.880
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				127.004.872				139.705.359
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Biro Perekonomian	3 Paket	19.375.000	PAD		3 Paket	21.312.500
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Biro Perekonomian	2 Paket	13.199.400	PAD		2 Paket	14.519.340



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian	33 Laporan	61.004.372	PAD		33 Laporan	67.104.809
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Perekonomian	1 DOKumen	33.426.100	PAD		1 Dokumen	36.768.710
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.232.960				71.756.256
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Biro Perekonomian	1 Laporan	65.232.960	PAD		1 Laporan	71.756.256
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.720.000				127.292.000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Perekonomian	2 Unit	61.840.000	PAD		2 Unit Kendaraan	68.024.000
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Biro Perekonomian	25 Unit	15.000.000	PAD		25 Unit	16.500.000
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diperlihara	Biro Perekonomian	5 Unit	38.880.000	PAD		5 Unit	42.768.000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.409.222.590	PAD			1.802.516.399
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				706.269.500				776.896.450



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		3 Dokumen	391.984.600	PAD		3 Dokumen	431.183.060
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		4 Dokumen	314.284.900	PAD		4 Dokumen	345.713.390
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				372.847.100				451.941.600
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		3 Dokumen	201.725.300	PAD		3 Dokumen	233.898.390
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		2 Dokumen	87.400.200	PAD		2 Dokumen	109.480.250
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		2 Dokumen	83.721.600	PAD		2 Dokumen	108.562.960
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				330.105.990				573.678.349
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		2 Dokumen	161.309.890	PAD		1 Dokumen	177.440.879



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi		1 Dokumen	74.924.400	PAD		1 Dokumen	87.691.670
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		-	-	PAD		1 Dokumen	100.000.000
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD		1 Dokumen	93.871.700	PAD		1 Dokumen	108.545.800
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		-	-	PAD		1 Dokumen	100.000.000



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2023 mendapat Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.867.300.922 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)** dengan Program dan Kegiatan yang telah di selaraskan melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian Program dan Kegiatan Renja 2023 adalah sebagai berikut :

I. Program Administrasi Umum

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan Mebel.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

II. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro;
2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;
3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD;
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.



Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3				4		5	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1.867.300.922		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1.867.300.922		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								458.078.332		
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu							96.810.900		
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Biro Perekonomian	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	22.665.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Biro Perekonomian	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	16.274.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3				4	5	8	9	10	
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	22.224.400		
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Biro Perekonomian	100%	1 Laporan	1 Laporan	17.139.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Biro Perekonomian	100%	2 Laporan	2 Laporan	18.506.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Berdasarkan SAP							44.098.800		
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Biro Perekonomian	100%	1 Laporan	1 Laporan	44.098.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3				4		5	8	9	10
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar							15.160.800		
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Biro Perekonomian	100%	1 Laporan	1 Laporan	15.160.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Internal							120.704.872		
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Biro Perekonomian	100%	3 Paket	3 Paket	19.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket	Biro Perekonomian	100%	2 Paket	2 Paket	13.199.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket	Semua Kabupaten Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	2 Paket	61.004.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3				4		5	8	9	10
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	Biro Perekonomian	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	27.126.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Internal							65.232.960		
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Biro Perekonomian	100%	1 Laporan	1 Laporan	65.232.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar							116.070.000		
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit	Biro Perekonomian	100%	2 Unit	2 Unit	62.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Unit	Biro Perekonomian	100%	25 Unit	25 Unit	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	



Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3				4	5	5	8	9	10
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis	Biro Perekonomian	100%	5 Jenis	5 Jenis	38.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1.409.222.590		
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Hasil Kajian dibidang perekonomian yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti							706.269.500		
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	391.984.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen	Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	314.284.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil kajian di bidang sumberdaya alam yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti							372.847.100		



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3			4		5	8	9	10	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen	Kab. Ketapang, Kab. Sanggau, Kab. Kayong Utara Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	201.725.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang, Kota Singkawang Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	87.400.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen	Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	83.721.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase kinerja BUMD/BLUD yang sehat							330.105.990		



**Rencana Kerja (RENJA)
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil kegiatan			
1	2	3				4	5	8	9	10	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen	Kab. Landak, Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	161.309.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	74.924.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	0	-	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Jumlah Dokumen	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	93.871.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	



BAB V PENUTUP

Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan melihat permasalahan yang ada di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta tujuan jangka menengah, sasaran dan arah kebijakan/ kegiatan prioritas Biro perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022, maka jumlah total yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp. 1.867.300.922** yang diimplementasikan kedalam 2 Program 9 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Demikian Renja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini diusulkan semoga dapat menjadi bahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan RAPBD serta khususnya dalam rangka untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Juni 2022
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

FRANS ZENO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790302 199802 1 001